

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM PASCA KEMERDEKAAN DAN PERKEMBANGANNYA

Samsinar S.*

Abstrac: While the concept of Islamic religious education is an attempt teachings of Islam and its values in order to handle a person's life. Islamic religious education has the objective of a tiered, starting from primary school to junior high school focused on the growth of faith and devotion to start learning the Koran, and worship practices in order verbalistik habituation and implementation efforts, for senior high school or equivalent is directed at the growth of faith and devotion by having the ability to read and write the Koran, and worship practices with own consciousness. Geared to college in the mastery of science education and the life of worship practices not only for himself but has had the ability to transfer to the community and be an example for them. Islamic Education also has developed after independence. These developments can be divided into three phases. The first phase (1946-1965), religious education is still looking for the form and format, and seem less important. The second phase (1966-1989), religious education has received attention from the government and people of Indonesia. And lastly, the third phase (1990-present), the position of religious education is increasingly important and strategic.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam dan Perkembangannya.

Pendidikan merupakan persoalan penting dalam hidup dan kehidupan. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat, dan sebagai wahana, sarana dan proses, serta alat untuk mentransfer warisan umat (Aly & Suparta, 2003:4). Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting yang mempunyai andil besar dalam memajukan suatu bangsa atau negara, bahkan peradaban manusia. Tujuan pendidikan merupakan tujuan dari negara itu sendiri. Pendidikan yang rendah

**Samsinar S.: Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone*

dan berkualitas akan terus mengundang para penjajah, baik penjajahan secara fisik maupun non-fisik, seperti penjajahan intelektual, pemikiran, ekonomi, sosial, politik, dan agama. Hal ini senada dengan ungkapan "kebodohan bukanlah karena penjajahan tetapi kebodohanlah yang mengundang penjajah".

Dalam sejarah pendidikan Islam, masa penjajahan Belanda dan Jepang sungguh menarik dan memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia selama 3 ½ abad dan Jepang selama 3 ½ tahun meninggalkan kesengsaraan, mental, dan kondisi psikologis yang lemah. Dengan misi *gold, glory, dan gospel*nya, mereka mempengaruhi pikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin Barat. Ketiga misi ini disebut dengan semboyan 3G yaitu *gold* adalah emas atau kekayaan bangsa, *glory* adalah kemenangan dan kekuasaan, dan *gospel* adalah upaya salibisani terhadap umat Islam di Indonesia. (Nizar, 2008:292). Akan tetapi, kita sepatutnya bangga dengan perjuangan tokoh muslim pada masa itu yang berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, majelis ta'lim, dan sebagainya. Dari lembaga inilah kemudian lahir tokoh-tokoh muslim yang berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan dan membela risalah Islam. Materi yang dipelajari menggunakan referensi dan kitab-kitab kuning berbahasa Arab. Selain itu, ilmu jiwa, dan ilmu hitung pun dipelajari. Pada saat itu, di samping menuntut ilmu, mereka juga berjuang melawan penjajah (<http://www.google.com>. Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kemerdekaan).

Pada masa pemerintahan Belanda, juga didirikan sekolah-sekolah Belanda yang telah menyebar ke seluruh Indonesia. Dan di sekolah itu, pendidikan agama khususnya Islam tidak diajarkan, mengingat kebijakan pemerintah Belanda netral terhadap agama. Pendidikan agama di zaman kolonial baru diberikan di sekolah setelah berdirinya sekolah-sekolah yang diasuh oleh organisasi Islam.

Memasuki masa kemerdekaan, pendidikan Islam masih terus berkuat dengan sistem pendidikan modern (peninggalan Belanda). Sistem pendidikan ini telah dipelopori oleh para tokoh pendidikan

yang telah mengenyam sistem pendidikan Belanda atau Barat. Oleh karena itu, menjadi sangat masuk akal, ketika sistem pendidikan Nasional Indonesia berkiblat kepada sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan yang berkiblat pada sistem pendidikan di Barat secara praktis, dan teoritis berbeda dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Dari sinilah kemudian terjadi pemisahan antara pendidikan tradisional yang dalam hal ini bias direpresentasikan oleh pendidikan Islam dan pendidikan modern yang dalam hal ini bias direpresentasikan oleh pendidikan Nasional. Kedua sistem pendidikan ini merupakan sebuah hasil kompromi para *funding father* negeri ini.

Kompromi yang diambil para *funding father* negeri ini adalah bahwa pengabaian sistem pendidikan Islam tradisional akan sangat menyakitkan umat Islam. Mengingat jasa dan pengorbanan para ulama dan santri dari triologi sistem pendidikan Islam. Pertimbangan lainnya adalah agar umat Islam memiliki lembaga pendidikan khusus, sehingga mayoritas penduduk Indonesia tidak mengalami kekecewaan yang luar biasa kepada pemerintah. Oleh karena itu, pada masa kemerdekaan tepatnya tanggal 3 Januari 1946 didirikanlah Departemen Agama yang mengurus keperluan umat Islam. Meskipun pada dasarnya Departemen Agama ini mengurus keperluan seluruh umat beragama di Indonesia, namun melihat latar belakang pendirinya jelas untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini (Ainurrofiq, *MencandraTrend Pendidikan Islam di Indonesia Masa Kini* dalam website <http://www.google.com>).

Dalam masalah pendidikan, kepentingan dan keinginan umat Islam ditampung di Departemen Agama. Namun sangat disayangkan perhatian para pemimpin negeri ini kurang begitu besar terhadap pendidikan Islam di bawah naungan Departemen Agama ini. Hal ini terbukti dengan anggaran yang sangat berbeda dengan pendidikan Nasional. Perbedaan perhatian dengan wujud kesenjangan anggaran ini kemudian menyebabkan munculnya perbedaan kualitas pendidikan yang berbeda. Di satu sisi, lembaga-lembaga pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional mengalami perkembangan pesat, sementara pendidikan Islam yang berada di bawah

payung Departemen Agama terseok-seok dalam mengikuti perkembangan zaman (Ainurrofiq, *MencandraTrend Pendidikan Islam di Indonesia Masa Kini* dalam wibsite <http://www.google.com>).

Secara operasional, pendidikan Agama yang berlangsung di sekolah-sekolah umum diatur oleh Menteri Agama di bawah naungan Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Nasional di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Di sekolah-sekolah negeri sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, pendidikan agama dilaksanakan dua jam pelajaran setiap minggunya (Daulay, 2004: 38). Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan agama Islam di sekolah umum, maka penulis akan menguraikannya pada pembahasan selanjutnya.

DISKURSUS PENDIDIKAN ISLAM

Konsep Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam

Dalam kajian Islam, term yang sering dipakai untuk menunjuk kajian pendidikan Islam adalah *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dīb* (Muhaimin, t.th.: 14). Ketiga kata ini masing-masing memiliki karakteristik makna di samping mempunyai kesesuaian dalam pengertian pendidikan.

Term *tarbiyah*, secara bahasa kata ini berasal dari tiga kata. Pertama, kata *rabā-yarbū* yang berarti bertambah, dan tumbuh, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Rum (30) : 39. Kedua, *rabiya-yarbā* berarti menjadi besar. Ketiga, *rabba-yarubbu* berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara (Al-Nahlawi, 1983: 31-32).

Naquib al-Attas memberikan catatan kritis penggunaan term *tarbiyah*. Ia melihat bahwa penggunaan istilah ini untuk menggambarkan pendidikan Islam terlalu dipaksakan. Pengertian yang terkandung dalam istilah ini tidak mewakili hakikat dan proses pendidikan Islam secara penuh. Karena itu, ia menyakini bahwa istilah ini tidak tepat digunakan untuk pengertian pendidikan Islam. Alasannya adalah *Pertama*, dalam leksikon utama bahasa Arab tidak ditemukan penggunaan istilah *tarbiyah* yang dipahami dengan

pendidikan yang khusus bagi manusia sesuai dengan perspektif Islam. *Kedua*, Alquran menggunakan term *tarbiyah* tidak mencerminkan faktor-faktor esensial pengetahuan, intelektual, dan kebajikan yang pada dasarnya merupakan komponen-komponen inti dalam pendidikan Islam yang sesungguhnya. *Ketiga*, konotasi *tarbiyah* cenderung kepada pemilikan pengetahuan, bukan kepada proses penanamannya. Padahal inti dari proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses penanaman itu, bukan pada pemilikannya (Al-Attas, 1994:65-74).

Selanjutnya, kata *ta'lim*. Kata ini secara etimologi berasal dari kata kerja *allama* yang berarti mengajar. Jadi, makna *ta'lim* dapat diartikan sebagai pengajaran, seperti dalam bahasa Arab dinyatakan *tarbiyah wa ta'lim* berarti pendidikan dan pengajaran (Abdullah, 2001:27). Kata *ta'lim* ini memiliki makna sebagai proses memberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah, sehingga terjadi pembersihan diri (*tazkiyah*) dari segala kotoran dan menjadikan dirinya dalam kondisi siap untuk menerima hikmah serta mempelajari segala sesuatu yang belum diketahuinya dan berguna bagi dirinya (Muhaimin & Abdul Mundjib, 1993:132).

Di dalam Alquran, kata *ta'lim* dengan kata kerja *allama* juga sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad saw., begitu juga dalam Hadis. Namun, kata *ta'lim* ini hanya berkonotasi memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan disebabkan pemberian pengetahuan (Daradjat, 2000:26).

Dalam konteks ini, Naquib al-Attas menganggap bahwa term *ta'lim* lebih dekat kepada makna pengajaran, bahkan lebih jauh ia mengatakan bahwa aspek kognitif yang dijangkaunya tidak memberikan porsi pengenalan secara mendasar (Al-Attas, 1994:72).

Selanjutnya adalah kata *ta'dib*. Kata ini secara bahasa mempunyai kata dan makna dasar. Pertama, *ta'dib* berasal dari kata dasar *aduba-ya'dubu* yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. Kedua, berasal dari kata dasar *adaba-ya'dibu* yang berarti mengadakan pesta atau perjamuan

yang berarti berbuat dan berperilaku sopan. Ke-tiga, berasal dari kata *addaba* sebagai bentuk kata kerja *ta'dīb* yang mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberi tindakan (Abdullah, 2001:34).

Naquib al-Attas menganggap bahwa kata ini dapat menggambarkan pengertian pendidikan Islam dalam keseluruhan esensinya yang fundamental. Istilah ini sudah mengandung arti ilmu (pengetahuan), pengajaran (*ta'lim*), dan pengasuhan (*tarbiyah*). Istilah ini dapat mencakup beberapa aspek yang menjadi hakikat pendidikan yang saling terkait, seperti *ilm* (ilmu), *'adl* (keadilan), *hikmah* (kebajikan), *'amal* (tindakan), *haq* (kebenaran), *nutq* (nalar), *nafs* (jiwa), *qalb* (hati), *aql* (pikiran), *maratib* (derajat), *ayah* (simbol), *adab* (etika) (Al-Attas, 1994:72).

Demikianlah ketiga term yang menunjuk makna pendidikan Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa term yang lebih tepat untuk menunjuk makna pendidikan Islam adalah term *ta'dīb*. Namun, untuk penggunaan dalam peristilahan di Indonesia, ketiga term ini tidak memiliki urgensi yang berarti karena untuk menunjuk makna pendidikan dalam Islam term pendidikan Islam sudah sangat familiar digunakan dan tidak perlu memperdebatkan kebenaran ketiga term di atas. Yang harus dipahami adalah konsep pendidikan Islam itu sendiri. Bukan pada kata apa yang lebih tepat. Dalam artian substansinya yang harus lebih ditekankan.

Selanjutnya secara terminologi, pengertian pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam berbeda. Kedua istilah ini biasanya dianggap sama, sehingga ketika seseorang berbicara tentang pendidikan Islam ternyata isinya terbatas pada pendidikan agama Islam, atau sebaliknya ketika seseorang berbicara tentang pendidikan agama Islam justru yang dibahas di dalamnya adalah pendidikan Islam. Padahal kedua istilah ini memiliki substansi yang berbeda.

Perbedaannya adalah pendidikan agama Islam dibakukan sebagai nama kegiatan mendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran seharusnya dinamakan "agama Islam", karena yang diajarkan adalah agama Islam bukan pendidikan

agama Islam. Nama kegiatannya atau usaha-usaha dalam mendidikan agama Islam disebut sebagai pendidikan agama Islam. Kata pendidikan ini ada dan mengikuti setiap mata pelajaran. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam sejajar atau sekategori dengan pendidikan matematika, pendidikan IPA/IPS (nama mata pelajarannya adalah matematika, IPA/IPS), pendidikan olahraga (nama mata pelajarannya adalah olahraga), pendidikan biologi (nama mata pelajarannya adalah biologi) dan seterusnya (Muhaimin, 2006:102). Sedangkan pendidikan Islam adalah nama sistem, yakni sistem pendidikan yang Islami, yang memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok muslim yang ideal. Dan pendidikan Islam adalah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Alquran dan Hadis (Muhaimin, 2006:5). Namun demikian, perbedaan kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mempunyai kaitan yang sangat erat. Karena itu, pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam.

Sebagai salah satu bagian dari pendidikan Islam, maka istilah pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa perspektif, yaitu sebagai berikut : (1) pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Alquran dan As-Sunnah. Dengan makna lain, pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari atau disemangati serta dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya, yaitu Alquran dan Hadis, (2) pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yaitu upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* seseorang. Dalam pengertian kedua ini, dapat berwujud segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya, dan segenap fenomena atau peristiwa penjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya adalah tertanamnya dan tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak, dan (3) pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan

berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Jadi, dalam pengertian yang ketiga ini, istilah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang sejarah (Muhaimin, 2002:29-30).

Walaupun istilah pendidikan Islam tersebut dapat dipahami secara berbeda, namun pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan terwujud secara operasional dalam satu sistem yang utuh.

Selain itu, pendidikan Islam juga dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dengan membimbing, mengasuh anak atau peserta didik agar dapat menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Karena itu, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sangat ideal, pendidikan yang menyelaraskan antara pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan masyarakat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat (Mappanganro, 1996:10). Selanjutnya, M. Yusuf al-Qardawi mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keteram-pilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya (Al-Qardhawi, 1980:157).

Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal dan memetik hasilnya di akhirat (Langgulung, 1980:94).

Selanjutnya, Abd. Rahman Getteng mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses penciptaan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan kepada Muhammad. Melalui proses pendidikan yang seperti itu, individu dibentuk agar dapat mencapai

derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan fungsinya sebagai 'abid dan khalifah di muka bumi serta berhasil mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu mencapai derajat takwa (Getteng, 2005:15). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam dan melalui proses tersebut, individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi dan pada akhirnya tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Secara kongkrit, Abdurrahman al-Nahlawi merumuskan bahwa pendidikan Islam itu, sekurang-kurangnya mengandung empat konsep dasar, yakni : (1) pendidikan merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki target, tujuan dan sasaran, (2) pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah swt. Dialah Pencipta fitrah, Pemberi bakat, Pembuat berbagai sunnah perkembangan, peningkatan dan interaksi fitrah sebagaimana Dia pun mensyariatkan aturan guna mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan dan kebahagiaan fitrah tersebut, (3) pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan dan pengajaran selaras dengan urutan sistematika menanjak yang membawa anak dari suatu perkembangan ke perkembangan lainnya, (4) peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah swt. menciptakannya. Artinya, pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah (Al-Nahlawy diterjemahkan Ali, 1992:21).

Dengan demikian, jika konsep pendidikan Islam yang disebutkan di atas dipahami dengan benar, maka membawa pada konsep syariat agama, karena agamalah yang harus menjadi akar pendidikan Islam.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa penekanan para ahli tentang pendidikan Islam sangat menekankan pada usaha membimbing ke arah pembentukan kepribadian di samping pengembangan diri

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tercapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tujuan adalah dunia cita, yakni suasana ideal yang ingin dicapai atau diwujudkan (Zuhairini, 1999:159). Suatu kegiatan yang tidak mempunyai tujuan tidaklah mempunyai arti apa-apa. Dengan kata lain, merumuskan tujuan bagi usaha yang ingin dilakukan sangatlah penting, termasuk tujuan pendidikan agama Islam. Pentingnya perumusan tujuan tercermin pada empat fungsi tujuan, yaitu *Pertama*, untuk mengakhiri usaha yang dilakukan, *Kedua*, untuk mengarahkan usaha yang dilakukan, *Ketiga*, tujuan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik merupakan tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama, *Keempat*, memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha itu (Marimba, 1962:44-45).

Secara umum, tujuan pendidikan agama Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam; yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi sebagai hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Jika di lihat dari segi konteks sosial-masyarakat, bangsa dan negara, maka pribadi yang bertaqwa ini menjadi *rahmatan lil'ālamīn*, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut tujuan akhir dari pendidikan agama Islam (Azra, 1999:8).

Selanjutnya, secara khusus tujuan pendidikan agama Islam berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : (1) tujuan pendidikan agama Islam untuk Sekolah Dasar yaitu memberikan bekal dasar serta pengalaman agama Islam. Dalam penjabarannya diarahkan kepada pokok-pokok keimanan, ibadah, akhlak, dan ajaran agama dalam kehidupan, seperti membaca Alquran, shalat, puasa, merupakan inti pokok, (2) tujuan pendidikan agama Islam untuk Sekolah Lanjutan yaitu memberikan bekal agama Islam lebih lanjut, dalam rangka pengamalan dan penghayatannya dalam kehidupan. Pendidikan agama Islam diberikan secara mendalam. Di

samping itu, diberikan pula nilai-nilai agama dalam hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam, serta mulai diberikan dalil-dalil dari Alquran dan Hadis. Perlu pula diperluas pengetahuan tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan dan dengan kepentingan masyarakat, (3) tujuan pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama Islam, serta mampu membudayakan diri dan lingkungannya dengan nilai-nilai Islam, di samping dapat mengamalkan ilmu dan keterampilannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penjabarannya diarahkan kepada peningkatan pengetahuan disertai hikmah dan manfaat penghayatan dan pengamalannya dalam hidup. Pada masing-masing fakultas diberikan pengertian tentang hubungan antara agama Islam dengan ilmu yang menjadi spesialisasinya, sehingga dapat dirasakan bahwa mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pengamalannya merupakan tuntutan agama (Daradjat, 1995:96-97).

Dalam kurikulum 1994 disebutkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam di sekolah umum adalah untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang Agama Islam dan bertaqwa kepada Allah swt., serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (Mastuhu, 1999:87).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan agama Islam berdasarkan jenjang pendidikan dimulai dari SD-SLTP diarahkan pada tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan dengan mulai belajar Alquran, dan praktek-praktek ibadah serta verbalistik dalam rangka pembiasaan dan upaya penerapannya, dan untuk SLTA atau sederajat dengannya diarahkan pada tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan dengan memiliki kemampuan baca tulis Alquran dan praktek-praktek ibadah dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, serta untuk perguruan tinggi diarahkan di dalam penguasaan ilmu pendidikan dan kehidupan praktek ibadahnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi telah memiliki kemampuan untuk menyebarkan kepada masyarakat dan menjadi teladan bagi mereka.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH PASCA KEMERDEKAAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sikap hidup religius ini telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Bekas-bekas peninggalan sejarah menunjukkan bukti nyata sikap tersebut.

Pada tanggal 1 Juni 1945, dihadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, Soekarno yang kemudian menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia, mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan, dan mengajak setiap bangsa Indonesia mengamalkan agamanya masing-masing (Daulay, 2007:85).

Revolusi nasional meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi kemerdekaan. Dengan ini tercapailah kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi mematahkan belenggu penjajahan dan menciptakan hidup baru di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dirasakan perlu untuk mengubah sistem pendidikan yang sesuai dengan suasana baru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Sila pertama itu merupakan perwujudan dari sikap hidup religius tersebut. Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar itu pulalah maka di dalam batang tubuh UUD 1945, diatur hal yang berkenaan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasi sikap hidup yang agamis dalam kehidupan berbangsa, maka pemerintah membentuk Departemen Agama dengan tugas utamanya adalah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dengan kehidupan beragama bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya pendidikan agama (Daulay, 2004:167).

Pendidikan agama sebagai suatu proses ikhtisariyah manusia mengandung ciri dan watak khusus di lihat dari kedua aspek yaitu

aspek subyektifitas dan aspek obyektifitas. Aspek subyektifitasnya adalah bahwa sikap hidup keberagamaan seseorang timbul dan didorong oleh pengalaman individualnya, sedangkan aspek obyektifitasnya adalah berarti bahwa sikap keberagamaan seseorang timbul dan didorong oleh pengaruh ajaran agama melalui pelbagai pemahaman terhadap petunjuk ajaran tersebut. Kebenaran yang diperoleh adalah bersifat obyektif (Arifin, 1995:214).

Pendidikan agama juga merupakan proses penanaman, pengembangan dan pemantapan nilai-nilai keimanan yang menjadi fundamen mental-spiritual manusia dari mana sikap dan tingkah lakunya termanifestasikan menurut kaidah-kaidah agamanya.

Ruang lingkup pendidikan agama yang dikelola oleh Departemen Agama tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah agama saja termasuk pesantren dan madrasah, tetapi juga menyangkut sekolah-sekolah umum. Upaya-upaya untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah umum, telah mulai sejak adanya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), diantara usul Badan tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, adalah termasuk masalah pengajaran agama, madrasah dan pesantren (Arifin, 1995:214).

Anjuran dari BPKNIP tanggal 27 Desember 1945, menyebutkan bahwa : "Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Tentang cara melakukan ini, baiklah kementerian mengadakan perundingan dengan badan pekerja. Madrasah dan Sekolah yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah"(Djaelani, 1980:135).

Usul badan pekerja itu, baru dapat dilaksanakan pada masa Menteri PP dan K yang dipegang Mr. Suwandi (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), dengan jalan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran

di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara. Dalam laporan tersebut, diajukan beberapa usulan tentang pendidikan agama sebagai berikut: (1) pelajaran agama dalam semua semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah, (2) para guru dibayar pemerintah, (3) pada sekolah dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas IV, (4) para guru diangkat oleh departemen agama, (5) para guru agama harus cakap dalam pendidikan umum, (6) pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama, (7) diadakan latihan bagi para guru agama, (8) kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki (Steenbrink, 1994:91).

Perhatian pemerintah RI terhadap madrasah dan pesantren ini semakin terbukti ketika Kementerian agama resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Dalam struktur organisasinya, ada bagian pendidikan dengan tugas pokoknya mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (Rahim, 2005:9).

Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen P&K (Depdikbud). Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pendidikan-pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama.

Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Ditandai dengan dikeluarkannya peraturan bersama dua menteri yaitu menteri agama dan menteri pendidikan dan pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat= Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu, keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB dua menteri belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak membe-rikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Oleh karena itu, pada tahun 1947 pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam yang dipimpin oleh

Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P dan K dan Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya adalah ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum (Muchtarom, 2000:154). Sebelum itu, pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pada tahun 1950 ketika kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh wilayah Indonesia, maka rencana pendidikan makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P&K, hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 isinya ialah: (1) pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar). Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat misalnya di Sumatera, Kalimantan maka pendidikan Agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah yang lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV, (2) di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu, (3) pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya, (4) pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan menteri pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama (<http://www.google.com>, dengan judul Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kemerdekaan, diakses 12 Maret 2009).

Pada periode orde lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan yaitu: (1) dari tahun 1945-1950 landasai idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan falsafah Pancasila, (2) pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di negara bagian Timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda, (3) pada tanggal 17 agustus 1950 dengan terbentuknya kembali Negara kesatuan RI landasan idiil pendidikan UUDS RI, (4) pada tahun 1959 Presiden mendek-ritkan RI kembali ke UUD 1945 dan menetapkan manifesto politik RI menjadi haluan

Negara, (5) pada tahun 1945, sesudah G 30 S/PKI kita kembali lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen ([http://www. google.com](http://www.google.com). dengan judul Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kemerdekaan, diakses 12 Maret 2009).

Di dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam pelaksanaan pendidikan tentu ia akan diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa sebagai pelajaran pokok, sila pertama ini terdapat butir-butir Pancasila yang mesti diamalkan. Di sekolah-sekolah didirikan pendidikan moral Pancasila dan salah satu butir sila pertama ini adalah percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran masing-masing. Akan tetapi jika kita cermati sejarah tercetusnya Pancasila khususnya sila pertama ini memiliki sejarah yang merugikan umat Islam dengan dihilangkannya 7 kata pada sila pertama yaitu dengan *menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya*. Akibatnya pengajaran Islam dan penerapan ajaran dan syariat tidak begitu berkembang secara pesat ([http://www. google.com](http://www.google.com). dengan judul Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kemerdekaan, diakses 12 Maret 2009).

Setelah meletusnya G.30.S/PKI yang disusul dengan lahirnya Orde Baru terjadilah transisi pendidikan agama memasuki era baru baik secara makro dan mikro. Yang dimaksud secara makro adalah situasi nasional yang berada dalam era pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan mikro adalah kondisi ke dalam pada masalah pendidikan agama. Pemikiran-pemikiran rasional spekulatif mewarnai dalam pola-pola keterpaduan, baik berupa konseptual maupun operasional diusahakan terus menerus. Kondisi seperti ini akhirnya melahirkan keputusan bersama antara menteri agama, menteri pendidikan dan kebudayaan dan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pendidikan agama di Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang dikenal dengan sebutan SKB Tiga Menteri itu melahirkan konsep baru dalam kurikulum Sekolah-sekolah Agama yang berada di bawah Departemen Agama dari Tingkat Dasar sampai Menengah Atas yang disebut madrasah memiliki kurikulum 30 : 70 untuk perbedaan bidang studi umum dan agama. Padahal, madrasah pada mulanya adalah sekolah-sekolah yang memberi porsi

lebih dari 50 % ilmu pengetahuan agama Islam dan pengetahuan ini dijadikan mata pelajaran pokok (Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1950 tentang bantuan madrasah) (Getteng, 1997:96-97).

Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik. Periode ini disebut zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. Pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekarang, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-Kanak (<http://www.google.com>., dengan judul Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kemer-dekaan).

Pendidikan agama mempunyai kedudukan yang semakin kuat setelah ditetapkan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 2 Tahun 1989 (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Bab II Pasal 4 UUSPN). Dalam UU tersebut juga dicantumkan tentang kedudukan pendidikan agama yaitu dalam Bab IX Pasal 39 ayat 2 tentang isi kurikulum. Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan ini,

jelaslah betapa penting dan strategis pendidikan agama di Indonesia (Daulay, 2007:89-90).

Pada era pembangunan sekarang ini, pendidikan agama di masyarakat telah dibina dan digalakkan dalam usaha untuk mengembangkan kehidupan beragama. Pendidikan agama dalam arti sebagai salah satu bidang studi telah diintegrasikan dalam kurikulum sekolah-sekolah negeri. Hal tersebut di atas ditegaskan dalam Tap MPR 1983 tentang GBHN bidang agama, point 1 c dan 1 d, adalah : 1 c., dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin dijamin baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup kemasyarakatan. Selanjutnya, 1 d., diusahakan supaya terus bertambah saran-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-universitas Negeri (Muchtarom, 2000:236-237).

Perkembangan pendidikan agama hingga saat sekarang ini, bila dicermati telah melalui tiga fase. Fase pertama (1946-1965), pendidikan agama masih mencari bentuk dan format, dan terdapat kesan pendidikan agama ketika itu kurang penting. Fase kedua (1966-1989), pemerintah dan rakyat Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme. Fase ketiga (1990-sekarang), pendidikan agama dan kedudukan pendidikan agama semakin strategis dan penting (Daulay, 2004:168-169).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perkembangan pendidikan agama khususnya agama Islam, semakin berkembang dengan pesat. Terlihat sejak Indonesia merdeka dan pasca kemerdekaan perhatian dan upaya pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan agama berlangsung sangat baik.

PENUTUP

Konsep pendidikan Islam adalah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Melalui proses tersebut, individu dibentuk agar mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi dan pada akhirnya tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Konsep pendidikan agama Islam adalah upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* seseorang. Dalam konsep ini, dapat berwujud segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya, dan segenap fenomena atau peristiwa penjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya adalah tertanamnya dan tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

Tujuan pendidikan agama Islam berdasarkan jenjang pendidikan adalah dimulai dari SD-SLTP diarahkan pada tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan dengan mulai belajar Alquran, dan praktek-praktek ibadah serta verbalistik dalam rangka pembiasaan dan upaya penerapannya, dan untuk SLTA atau sederajat dengannya diarahkan pada tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan dengan memiliki kemampuan baca tulis Alquran dan praktek-praktek ibadah dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, serta untuk perguruan tinggi diarahkan di dalam penguasaan ilmu pendidikan dan kehidupan praktek ibadahnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi telah memiliki kemampuan untuk mentransferkan kepada masyarakat dan menjadi teladan bagi mereka.

Perkembangan pendidikan agama Islam pasca kemerdekaan dapat dibagi tiga fase. Pertama (1946-1965), pendidikan agama masih mencari bentuk dan format, dan terdapat kesan pendidikan agama ketika itu kurang penting. Kedua (1966-1989), pemerintah dan rakyat Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme. Ketiga (1990-sekarang), pendidikan agama dan kedudukan pendidikan agama semakin penting dan strategis.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Abd. Rahman. *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam: Rekonstruksi Pemikiran dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ainurrofiq, *MencandraTrend Pendidikan Islam di Indonesia Masa Kini* dalam wibsite <http://www.google.com>.
- Aly, Hery Noer dan Suparta, Munszier. *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*. Cet. I; Jakarta: Triasco, 2003.
- Al-Attas, Muhammad al-Naquib. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1994.
- Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Azra, Azymardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Depag, 2000.
- . *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*. Cet. II; Jakarta: Ruhama, 1995.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Djaelani, H. A. Timur. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Jakarta: Dermaga, 1980.
- Getteng, Abd. Rahman. *Pendidikan Islam dalam Pembangunan: Moral, Remaja, Wanita, Pembangunan*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1997.

- _____. *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis dari Tradisional Hingga Modern. Cet. I;* Yogyakarta: Grha Guru, 2005.
- [http://www. google.com](http://www.google.com). dengan judul *Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kemerdekaan*
- Langgulang, Hasan. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam.* Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Mappanganro. *Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah.* Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Cet. I;* Bandung: al-Ma'arif, 1962.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam. Cet. I;* Jakarta: Logos, 1999).
- Muhaimin dan Abdul Mudjib. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya. Cet. I;* Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Muhaimin, et.al. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Cet. II;* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhaimin, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam. Cet. I;* Surabaya: Karya Abditama, t.th.
- _____. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Nahlawi, Abdurrahman. *Ushul al-Tarbiyah al-Silamiyah wa Asalibuhā*, diterjemahkan oleh Sihabuddin dengan judul *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat.* Jakarta: Gema Insani Press, 1983.
- _____. *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha*, diterjemahkan oleh Herry Noor Ali dengan judul *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam. Cet. II;* Bandung: IKAPI, 1992.

Nizar, Syamsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna* diterjemahkan oleh Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Rahim, Husni. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Pendidikan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2005.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1994.

Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

ISSN 1978-0214

DIDAKTIKA

JURNAL KEPENDIDIKAN

Volume 7 Nomor 2 Nopember 2012

**Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Watampone**

DIDAKTIKA Jur. Kep.	Vol. 7	No. 2	Hal. 159 - 330	Watampone Nop. 2012	ISSN 1978-0214
-------------------------------	---------------	--------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------